

Perang Dunia II dan Perubahan Lanskap Kekuasaan di Indonesia: Pendudukan Jepang dan Respons Rakyat

Anggun Ronauli¹ Adinda Dwi Saputri² Lorenti br Nainggolan³ Djumar Sumbayak⁴
Rosmaida Sinaga⁵

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: anggunronauli01@gmail.com¹ adindadwisaputri7@gmail.com²
lorentinainggolan24@gmail.com³ djumarsumbayak7@gmail.com⁴
rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II (1942–1945) menjadi titik balik dalam sejarah kekuasaan kolonial di Asia Tenggara. Jepang menggantikan Belanda sebagai penguasa, menerapkan pemerintahan militer yang represif namun juga membuka ruang bagi tumbuhnya nasionalisme. Artikel ini mengkaji bagaimana pendudukan Jepang menyebabkan perubahan dalam lanskap kekuasaan politik di Indonesia, serta menganalisis respons rakyat yang meliputi kolaborasi, perlawanan, dan adaptasi terhadap kondisi baru. Meskipun rakyat mengalami penderitaan akibat kebijakan Jepang seperti romusha dan kekurangan pangan, pengalaman masa pendudukan ini justru memperkuat semangat kemerdekaan. Dengan menggunakan pendekatan historis, artikel ini menyoroti bagaimana dinamika pendudukan Jepang membentuk fondasi penting bagi lahirnya Republik Indonesia pada tahun 1945.

Kata Kunci: Pendudukan Jepang, Perang Dunia II, Perubahan kekuasaan, Nasionalisme, Kemerdekaan Indonesia, Respons Rakyat, Kolonialisme

Abstract

The Japanese occupation of Indonesia during World War II (1942–1945) marked a turning point in the colonial power structure in Southeast Asia. Replacing the Dutch as the ruling force, the Japanese implemented a repressive military regime while simultaneously fostering the rise of Indonesian nationalism. This article examines how the occupation altered the political landscape in Indonesia and analyzes the varied responses of the Indonesian people, including collaboration, resistance, and adaptation. Despite widespread suffering caused by forced labor (romusha), food shortages, and military control, the experience under Japanese rule strengthened the national spirit and accelerated the path toward independence. Using a historical approach, this article highlights the critical role of the Japanese occupation in laying the groundwork for the proclamation of the Republic of Indonesia in 1945.

Keywords: Japanese Occupation, World War II, Power Shift, Indonesian Nationalism, Independence, Public Response, Colonialism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perang Dunia II telah membawa perubahan geopolitik yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Di Indonesia, perang ini menjadi titik balik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Sebelum tahun 1942, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda selama lebih dari tiga abad. Namun, invasi dan pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun itu membawa perubahan radikal dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang bukan hanya sekedar pergantian kekuasaan kolonial, tetapi juga memperkenalkan tatanan baru yang, meskipun represif, turut memunculkan dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Pendudukan ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana dinamika antara penindasan dan kolaborasi melahirkan

fondasi penting bagi gerakan kemerdekaan. Di balik eksploitasi dan kekerasan, Jepang secara tidak langsung memberi ruang bagi terbentuknya organisasi, pelatihan militer, dan peran politik bagi tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pendudukan Jepang mengubah lanskap kekuasaan di Indonesia dan bagaimana rakyat meresponsnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan historis. Tujuannya adalah untuk memahami dampak pendudukan Jepang terhadap perubahan struktur kekuasaan dan tumbuhnya nasionalisme di Indonesia selama periode 1942–1945. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku sejarah, arsip, jurnal ilmiah, pidato tokoh nasional, serta dokumen resmi dari masa pendudukan Jepang dan pemerintahan kolonial Belanda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis historis, yang terdiri dari empat tahapan: Heuristik atau pengumpulan sumber, Verifikasi untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber, Interpretasi terhadap fakta sejarah, dan Historiografi, yaitu penyusunan narasi secara sistematis. Penelitian ini dibatasi pada konteks Indonesia pada masa pendudukan Jepang, dengan fokus pada aspek sosial dan politik yang memengaruhi proses kemerdekaan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pendudukan jepang terhadap kemerdekaan

1. Mendorong nasionalisme: Pendudukan Jepang turut mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Walaupun Jepang merupakan penjajah, mereka memberi kesempatan kepada para pemuda dan tokoh-tokoh nasionalis untuk membentuk dan bergabung dalam berbagai organisasi. Salah satu contohnya adalah pendirian organisasi seperti Jepang Dai Nippon, yang menjadi wadah bagi perkembangan nasionalisme yang lebih terorganisir. Hal ini turut memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional di tengah masyarakat.
2. Pendidikan dan mobilisasi: Jepang mengubah sistem pendidikan dan memberikan pelatihan militer kepada masyarakat. Meskipun sekolah-sekolah dijalankan dengan Kurikulum yang dirancang untuk mendukung propaganda Jepang memberikan peluang bagi para pemuda untuk menimba ilmu dan membentuk organisasi. Selain itu, pelatihan militer yang diadakan oleh Jepang turut mengembangkan keterampilan yang kelak berguna dalam perjuangan melawan penjajahan, serta melahirkan calon-calon pemimpin dari kalangan generasi muda.
3. Perubahan strategi pergerakan: Selama masa sebelum pendudukan Jepang, gerakan kemerdekaan di Indonesia cenderung bersifat elit dan terfragmentasi. Namun, ketika Jepang mulai menduduki wilayah Indonesia, terjadi perubahan dalam strategi pergerakan. Berbagai organisasi mulai menunjukkan solidaritas dan bersatu dalam menghadapi penjajahan. Tokoh-tokoh penting seperti Sukarno dan Mohammad Hatta, yang sebelumnya bergerak dalam kelompok yang berbeda, mulai bekerja sama untuk melawan dominasi Jepang serta merancang langkah-langkah menuju kemerdekaan setelah perang usai.
4. Dampak ekonomi dan sosial: Jepang mengubah struktur ekonomi dengan memaksa masyarakat bekerja di sektor-sektor yang mendukung upaya perang. Walaupun hal ini mengakibatkan penderitaan, Situasi tersebut membangkitkan kesadaran bersama akan adanya eksploitasi dan ketidakadilan, sehingga memperkuat semangat dalam gerakan kemerdekaan. Para pejuang mulai memahami bahwa perlawanan terhadap penindasan harus dilakukan secara kolektif dan terorganisir.

5. Keadaan setelah Perang Dunia II: Menyerahnya Jepang pada tahun 1945 menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh para pemimpin nasionalis untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pengalaman selama masa pendudukan serta pelatihan yang diperoleh para pemuda menjadi landasan kuat bagi terbentuknya persatuan dan ketangguhan dalam melawan upaya Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Strategi dan Implementasi Kekuasaan Jepang

Jepang memasuki Indonesia dengan tujuan strategis menguasai sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan perang mereka. Melalui propaganda "Asia untuk Asia", Jepang berusaha mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Setelah berhasil menguasai wilayah ini, Jepang membubarkan struktur kolonial Belanda dan menggantinya dengan pemerintahan militer yang otoriter dan sentralistik. Jepang juga menghapus pengaruh Barat dengan melarang bahasa dan pendidikan Belanda, serta mengontrol media untuk menyebarkan ideologi Jepang. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan menguatkan posisi Jepang sekaligus membatasi pengaruh kolonial lama. Meskipun pendudukan Jepang bersifat kolonial dan represif, keberadaannya turut mengubah arah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jepang secara tidak langsung mempercepat proses menuju kemerdekaan melalui mobilisasi rakyat, pengaruh dalam bidang pendidikan, dan pembentukan rasa kebangsaan. Situasi ini mendorong perubahan dalam strategi perjuangan yang menjadi lebih terarah dan terorganisir, yang pada akhirnya turut berperan dalam terwujudnya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Eksplotasi dan Represi

Pendudukan Jepang diwarnai dengan kebijakan kerja paksa (*romusha*) yang memaksa ribuan rakyat bekerja tanpa upah yang layak dalam proyek militer dan infrastruktur. Kondisi ini diperparah oleh kelangkaan pangan dan tindakan keras militer Jepang, yang menyebabkan penderitaan luas dan kematian massal di beberapa daerah.

Respons Rakyat Indonesia

Respons rakyat Indonesia sangat beragam. Tokoh nasionalis seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir memilih berkolaborasi dengan Jepang, memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jepang juga membentuk organisasi semi-militer seperti PETA yang melatih pemuda Indonesia, yang kemudian menjadi basis kekuatan militer perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain, rakyat biasa banyak yang mengalami penderitaan berat akibat kerja paksa, kelaparan, dan penindasan. Perlawanan muncul dalam bentuk sabotase, aksi diam-diam, dan beberapa pemberontakan meskipun berisiko tinggi.

Implikasi Jangka Panjang

Pendudukan Jepang menghancurkan struktur kolonial Belanda yang sudah mapan dan membuka ruang bagi kemunculan pemerintahan nasional Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Indonesia melanjutkan perjuangan kemerdekaan dengan modal sosial-politik dan militer yang terakumulasi selama masa pendudukan. Pendudukan Jepang dengan demikian merupakan faktor penting dalam perubahan lanskap kekuasaan menuju kedaulatan Indonesia. Gaya aturan yang kontras beralih ke tesis saya bahwa munculnya administrasi militer Jepang di Indonesia bergerak sebagai dinamika perubahan sosial dan politik yang mendalam, saya ingin menyebutkan dua statistik. Salah satunya adalah bahwa otoritas kolonial Belanda mampu mempertahankan perdamaian dan ketertiban sebelum Perang Pasifik dengan kekuatan

hanya 40.000 tentara, tetapi setelah perang, Belanda gagal mengambil kembali bekas koloni itu meskipun itu dikirim dengan kekuatan 145.000. Yang lain adalah kenyataan bahwa 957 tentara Jepang meninggal dalam serangan terhadap Hindia Timur Belanda, sementara 1.078 Jepang meninggal dalam bentrokan langsung atau tidak langsung dengan kelompok-kelompok Indonesia berjuang untuk kemerdekaan dari akhir Perang Pasifik hingga Juni 1946 (Miyamoto 1973: 363). Kedua statistik ini menunjukkan perubahan yang cukup besar terjadi di Indonesia antara Maret 1942 dan Agustus 1945. Dengan kata lain, Indonesia mengalami transformasi politik dan sosial yang signifikan selama 'vakum' tiga-setengah tahun yang sesuai dengan pekerjaan Jepang. Orang-orang, yang digambarkan oleh seorang sejarawan Belanda sebagai 'orang-orang yang lemah lembut di bumi' (Rommelink 1978: 63), membangkitkan diri mereka sendiri dan meluncurkan perjuangan kemerdekaan dengan semangat revolusioner yang membuat semua pengamat. Berbagai cara situasi di bawah pemerintahan Jepang berbeda dari itu di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang mendahului itu mungkin merupakan faktor utama di balik perubahan besar yang terjadi selama pemerintahan Jepang. Penting untuk diingat bahwa realitas politik dan sosial dari aturan Belanda dan Jepang bukanlah produk sederhana dari keputusan yang dikeluarkan dari atas tetapi dibentuk dalam konteks interaksi yang dinamis di antara dan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat Indonesia dan mereka yang beragama. Pada bagian ini saya akan membatasi diri untuk berkonsentrasi pada cara-cara kebijakan sadar yang lama dan penguasa asing baru Indonesia menyimpang untuk menetapkan panggung untuk diskusi tentang perubahan yang muncul dan warisan administrasi militer Jepang.

Perbedaan yang nyata antara Belanda dan Jepang

Dalam gaya aturan mereka juga ada perbedaan yang nyata antara Belanda dan Jepang. Kecuali untuk periode Perang Dunia Pertama, pemerintahan Belanda adalah rezim waktu perdamaian yang diatur oleh Rasionalisme, dalam apa yang disebut Anderson 'yang tenang, seperti bisnis, borjuis'.² daripada menerapkan aparat paksaan, administrasi Belanda berurusan dengan yang diperintah melalui Perintah Halus (Pesanan Lembut). Administrasi militer Jepang menghadirkan gambaran yang sangat berbeda, sebagian karena dilakukan bersamaan dengan penuntutan perang, dan ditandai dengan ideologis, romantis fanatik. Oleh karena itu pria militer Jepang berurusan dengan orang Indonesia dalam mode Kasar (kasar, kasar) yang dilambangkan oleh praktik 'tamparan wajah'. Karena itu dalam prinsip dan gaya pemerintahan, oleh karena itu, sikap para penjajah Belanda dan Jepang dengan jelas menodai. Nada aturan sebelumnya adalah statis, lebih memilih status quo, sedangkan yang terakhir dinamis dan mendukung perubahan mendasar.

KESIMPULAN

Pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II merupakan periode penting yang merubah lanskap kekuasaan dari kolonial Belanda menuju kemerdekaan. Meskipun membawa penderitaan melalui kerja paksa dan penindasan, pendudukan ini juga memicu kebangkitan nasionalisme dan membuka ruang bagi organisasi serta pelatihan militer yang menjadi modal perjuangan kemerdekaan. Respons rakyat yang beragam—mulai dari kolaborasi strategis hingga perlawanan—menggambarkan dinamika sosial-politik yang kompleks. Dengan demikian, pendudukan Jepang berperan sebagai momentum penting yang mempercepat proses dekolonisasi dan lahirnya Indonesia merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Cribb, R. (1986). The Japanese Occupation of Indonesia: A Reassessment. *Journal of Southeast Asian Studies*, 17(1), 97-104



- Cribb, R. (2000). *The Indonesian Killings of 1965-1966*. Allen & Unwin.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Ken'ichi, G. (1996). *Modern Japan and Indonesia: The dynamics and legacy of wartime rule*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 152(4), 536–552.
- Reid, A. (2014). *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Cambridge University Press.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Palgrave.
- Sihombing, M., Sianturi, L. Y., & Oktavia, N. W. (2024). *Perubahan politik di Indonesia selama masa pendudukan Jepang*. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 1(2), 700–703.
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.